

**EVALUASI PROGRAM PENANGANAN ANAK JALANAN
MELALUI PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (PLK) BERBASIS
KELEMBAGAAN LOKAL DI KOTA SURAKARTA**

Tulus Vilana Deny Eka Puspita Anggraeni

K8409068

Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jalan Ir. Sutami no. 36 A, Kentingan Surakarta

Telepon 0271-634880 Fax 0271-634880

Email: tuluz_viel@yahoo.co.id

ABSTRAK

Fenomena anak jalanan merupakan bagian dari masyarakat modern saat ini. Adanya anak jalanan merupakan indikator berkembangnya suatu kota. Jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, termasuk jumlah anak jalanan di Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta telah menggulirkan berbagai program penanganan anak jalanan namun belum mampu mengentaskan anak dari kehidupan di jalan. Program tersebut belum berhasil karena belum berperspektif anak. Salah satu program penanganan anak jalanan yang sudah berperspektif anak adalah Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Anak Jalanan. Penyelenggara program ini adalah LSM Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran Seroja. Dalam perkembangannya penyelenggaraan PLK Anak Jalanan berpengaruh terhadap kehidupan anak jalanan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian penelitian evaluasi. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengambilan cuplikan dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi anak jalanan terhadap program PLK Anak Jalanan, tahapan dalam penyelenggaraan terdiri dari izin penyelenggaraan, rekrutmen peserta didik, proses pembelajaran, manajemen penyelenggaraan, penilaian dan evaluasi. Hambatan dalam PLK Anak Jalanan berupa kurangnya motivasi peserta didik, dukungan orang tua dan dinas terkait. Dampak dari PLK Anak Jalanan yaitu intensitas anak beraktivitas di jalan berkurang serta anak jalanan mendapatkan ijasah Kejar Paket A dan sertifikat pendidikan keterampilan hidup. Adanya koordinasi antara Pemerintah kota dengan LSM penyelenggara PLK Anak Jalanan diharapkan dapat mengatasi permasalahan anak jalanan yang lebih berperspektif anak.

Kata kunci : anak jalanan, Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Anak Jalanan, evaluasi, LSM

A. Pendahuluan

Fenomena anak jalanan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kota-kota besar di Indonesia, termasuk di Kota Surakarta. “Anak jalanan sudah menjadi bagian dari komunitas kota, dan telah menyatu dengan kehidupan jalanan di sebagian besar daerah perkotaan Indonesia” (Setiawan, 2007: 32). Banyak faktor yang menjadikan seorang anak memilih menjadi anak jalanan. Kesulitan ekonomi dalam keluarga atau kemiskinan merupakan faktor utama yang selama ini dijadikan alasan seorang anak terjun menjadi anak jalanan. Membantu perekonomian keluarga dengan cara mencari nafkah di jalanan merupakan solusi yang banyak dipilih oleh anak.

Berdasarkan data dari Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran (PPAP) Seroja jumlah anak jalanan di Kota Surakarta mencapai 103 anak Tahun 2010. Jumlah tersebut hanya sebagian kecil yang berhasil dijangkau (*Tempo Online*, 3 Mei 2011). Kenaikan jumlah anak jalanan juga terjadi pada Tahun 2011, di mana jumlah anak jalanan yang berhasil di data oleh LSM PPAP Seroja berjumlah 114 orang. Berbagai program telah digulirkan pemerintah kota untuk menangani masalah anak jalanan, namun program tersebut belum dapat mengurangi jumlah anak jalanan karena belum berperspektif anak.

Adanya wacana dari Direktorat Pendidikan Luar Biasa tentang Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Anak Jalanan merupakan salah satu program penanganan anak jalanan yang berperspektif anak. Penyelenggara PLK Anak Jalanan adalah LSM Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran Seroja. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, (1) Bagaimana persepsi anak jalanan terhadap adanya program penanganan yang dilakukan oleh LSM selama ini, (2) Bagaimana proses pelaksanaan program penanggulangan anak jalanan melalui PLK Anak Jalanan yang dilakukan oleh LSM di kota Surakarta, (3) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program penanganan anak jalanan melalui PLK Anak Jalanan yang dilakukan oleh LSM di kota

Surakarta, (3) Bagaimanan dampak pelaksanaan program penanganan anak jalanan melalui PLK Anak Jalanan bagi anak jalanan itu sendiri.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yakni penelitian evaluasi. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengambilan cuplikan dengan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in dept interviewing*), observasi dan studi dokumentasi. Uji validitas data yang digunakan yaitu triangulasi data (sumber) dan metode. Teknik analisis menggunakan model analisis data interaktif yang terdiri terdiri dari empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan.

C. Review Literatur

Anak jalanan termasuk anak yang terpinggirkan, rentan dan rawan dieksploitasi oleh orang dewasa dilingkungannya. Terpinggirkan atau termarginalisasi karena mereka menjalani kehidupan di jalanan dan bekerja serabutan sehingga kurang mendapatkan perhatian. Rentan terhadap kecelakaan lalu lintas, pelecehan seksual, ancaman kesehatan, dan masalah sosial lain di jalanan. Rawan menjadi korban eksploitasi oleh orang yang lebih dewasa, di mana pelaku eksploitasi tersebut bisa saja orang tua mereka sendiri yang menyuruh anaknya bekerja di jalanan, preman atau oknum tertentu yang memanfaatkan anak jalanan sebagai pekerja anak, ataupun dari aparat yang melakukan penertiban dengan kekerasan. Anak jalanan adalah anak yang berusia 0-18 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan atau di tempat umum (*Panduan Umum Pemutakhiran dan Pemetaan Data PMKS dan PSKS Propinsi Jawa Tengah*: 2012).

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1, “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Sejalan dengan amanat dalam undang-undang tersebut maka pemerintah secara bertahap berusaha pemeratakan pendidikan bagi anak. Upaya tersebut dilakukan dengan mengadakan PLK Anak Jalanan untuk

memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak jalanan. Pendidikan Layanan Khusus Anak Jalanan adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk anak-anak jalanan melalui jenjang (tingkat satuan dasar dan menengah) dalam rangka mengembangkan potensi dirinya agar menjadi manusia yang bermartabat, kreatif, dapat memiliki kompetensi hidup dan mandiri untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik (*Pedoman Penyelenggaraan PLK Anak Jalanan*, 2010).

Sebuah program merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan berlangsung dalam waktu yang lama. Program berkaitan erat dengan pengambilan keputusan dan penentuan keberlangsungan suatu program itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan evaluasi program untuk mengetahui pencapaian dari apa yang telah direncanakan dan keterlaksanaannya. Adapun pengertian evaluasi program menurut Mugiadi (1980) adalah upaya pengumpulan informasi mengenai suatu program, kegiatan, atau proyek (Sudjana, 2006: 21). Dari pengertian tersebut, maka evaluasi program dapat didefinisikan sebagai kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan informasi. Informasi tersebut berguna untuk memperbaiki program yang sudah ada, menyempurnakan kegiatan program lanjutan, menyebarluaskan gagasan tentang program yang berjalan ataupun menghentikan suatu kegiatan dalam program.

D. Pembahasan

1. Anak Jalanan sebagai Gejala Patologi Masyarakat Modern

Fenomena anak jalanan di Kota Surakarta merupakan bagian dari masyarakat modern saat ini. Anak jalanan merupakan bagian dari masyarakat yang termarginalisasi oleh lingkungannya. Padahal anak jalanan mempunyai hak yang sama dengan anak yang lain. Hanya saja keberadaan anak jalanan dianggap sebagai pengganggu ketertiban umum oleh masyarakat. Masyarakat modern memiliki seperangkat kebutuhan dan fungsi-fungsi tertentu yang harus terpenuhi oleh bagian-bagian dari masyarakat itu sendiri agar keadaannya normal dan langgeng (Maliki, 2004:26). Seperti halnya anak jalanan juga memiliki kebutuhan

dan fungsi mereka sebagai anak, namun pada kenyataannya anak jalanan tidak terpenuhi kebutuhan dan fungsinya sebagai anak. Kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, aktualisasi diri dan partisipasi anak jalanan dalam masyarakat tidak terpenuhi dengan baik, ditambah dengan kesadaran kolektif dari masyarakat untuk menerima keberadaan anak jalanan yang rendah menjadikan kemunculan anak jalanan sebagai gejala patologi. Dari sinilah muncul wacana tentang hukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan sosial atau norma sosial. Pada kasus ini adanya upaya hukum bagi anak jalanan dilakukan untuk memperbaiki kembali anak jalanan agar dapat diterima masyarakat. Hukum restitutif berlaku pada masyarakat dengan solidaritas organik (Abdullah, 1986: 14).

Adanya spesialisasi kerja dalam masyarakat modern menimbulkan pembagian kerja berdasarkan spesialisasi, sehingga dari spesialisasi tersebut menentukan posisi, tugas dan kewenangan yang jelas dari anggota masyarakat. Dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam penanganan anak jalanan adalah pemerintah melalui Dinas Sosial, pada kenyataannya Dinas Sosial sudah berupaya memberikan program identifikasi anak jalanan dan pemberian pendidikan ketrampilan hidup serta bantuan modal usaha, namun program seperti ini belum mampu menangani anak jalanan. Selama ini Dinas Sosial hanya memberikan pendidikan ketrampilan hidup (*life skill*) dan bantuan untuk modal usaha bagi anak jalanan serta memberikan bantuan dana bagi LSM pemerhati anak yang juga menangani anak jalanan. Padahal setiap anak memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar mereka seperti pendidikan. Program Dinas Sosial ini pun tidak dapat diakses oleh semua anak jalanan karena jumlah peserta yang terbatas dan tidak setiap bulan program pendidikan ketrampilan hidup (*life skill*) diadakan. Anak jalanan pun mempunyai persepsi yang berbeda dengan adanya program seperti ini. Ada anak jalanan yang mengikuti program ketrampilan hidup karena terpaksa. Ada anak jalanan yang bisa menerima dan berpandangan positif dengan adanya program seperti ini. Banyak kalangan aktivis LSM yang

menanggap program yang dilakukan Dinas Sosial selama ini belum menampakkan hasil nyata begitu pula penanganan yang dilakukan LSM karena masih dijumpai anak jalanan yang berkeliaran di Kota Surakarta.

Berdasarkan pemaparan tersebut, kemunculan anak jalanan merupakan gejala patologi dalam masyarakat modern, sehingga perlu adanya upaya penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial. Upaya tersebut termasuk ke dalam hukum restitutif yakni memperbaiki kondisi anak jalanan untuk menjaga keutuhan sosial yang ada.

2. LSM sebagai *Counter Hegemonic* dari Negara

Direktorat Pendidikan Luar Biasa mempunyai program pendidikan formal bagi anak jalanan sebagai upaya pemerataan pendidikan bagi seluruh anak di Indonesia tidak terkecuali bagi anak jalanan. Pendidikan Layanan Khusus (PLK) untuk Anak Jalanan berupaya memenuhi kebutuhan dasar anak jalanan dalam hal pendidikan. Mengingat program ini adalah program dari pemerintah, seharusnya ada koordinasi dari Disdikpora dan Dinas Sosial Kota Surakarta untuk menyelenggarakan PLK Anak Jalanan, namun adanya spesialisasi kerja dan adanya penegak yang dianggap berwenang dalam menangani anak jalanan menyebabkan adanya pembagian kerja yang terkotak-kotak sehingga kesadaran kolektif Disdikpora dan Dinas Sosial Kota Surakarta rendah dan terjadi lempar tanggung jawab antara satu instansi dengan instansi yang lain

Seperti yang diungkapkan oleh Gramsci, negara dalam hal ini diwakili oleh Dinas Sosial dan Disdikpora tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya yakni anak jalanan untuk bisa mengakses pendidikan formal, sehingga dapat dikatakan negara gagal dalam menjalankan kewajibannya. Dari kejadian tersebut muncullah gerakan sosial dari LSM untuk menyelenggarakan PLK Anak Jalanan. Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan bagian dari *civil society*. Menurut Antonio Gramsci, *civil society* adalah suatu wadah perjuangan kelas dan perjuangan demokrasi kerakyatan. Masyarakat sipil merupakan wadah kelompok subordinat (kelompok masyarakat sosial yang rendah) dapat memberikan

perlawanan terhadap negara dan membangun hegemoni alternatif (hegemoni tandingan) atau *counter hegemony* (Hadiwijoyo, 2012: 116). Namun dalam perjalanannya *civil society* dan negara tidak harus bertentangan. Bentuk *counter hegemony* dari *civil society* dapat berupa *social movement* (gerakan sosial).

Seperti dalam penyelenggaraan PLK Anak Jalanan. Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa melakukan intervensi dalam hal pendanaan dan memberikan pedoman penyelenggaraan PLK Anak Jalanan. Begitu pula intervensi yang dilakukan Disdikpora Kota Surakarta dalam penyelenggaraan PLK Anak Jalanan oleh LSM sebatas memberikan regulasi perijinan dan kunjungan ke LSM. Padahal Disdikpora Kota Surakarta seharusnya mempunyai peran yang lebih besar untuk mendorong berlangsungnya PLK Anak Jalanan dan Sosialisasi kepada masyarakat.

LSM berperan penuh dalam penyelenggaraan PLK Anak Jalanan. hal ini dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya rekrutmen peserta didik yang dilakukan oleh LSM sendiri bukan rekomendasi dari Dinas Sosial. Dari sini terlihat bahwa LSM merupakan *counter hegemonic* dari negara (Dinas Sosial dan Disdikpora), di mana memberikan hak pendidikan bagi anak merupakan tanggung jawab negara, namun adanya spesialisasi kerja membuat negara melepaskan tanggung jawabnya, kemudian peran untuk memberikan pendidikan bagi anak jalanan diambil alih oleh LSM meskipun program tersebut awalnya adalah program pemerintah pusat.

Dalam hal manajemen penyelenggaraan PLK Anak Jalanan, LSM juga berupaya sendiri untuk memperoleh dana bagi keberlangsungan PLK Anak Jalanan. Dana operasional PLK Anak Jalanan diperoleh LSM melalui swadaya masyarakat dengan adanya program kakak asuh dan swadaya LSM sendiri. Begitu pula dengan sarana dan prasarana dalam PLK Anak Jalanan yang belum memadai mengingat kekurangan dana operasional sehingga tempat belajar menggunakan salah satu ruang di sekretariat LSM, adapun KBM dilakukan dengan lesehan. Beberapa peserta didik mengeluhkan ketiadaan bangku untuk duduk menjadikan

KBM kurang nyaman. Kekurangan sarana prasarana juga diungkapkan salah satu tenaga pendidik, tidak adanya alat peraga pendidikan untuk menunjang KBM menjadikan beberapa anak mengalami kendala dalam penerimaan materi pelajaran.

Tenaga Pendidik dan kependidikan yang ada dalam PLK Anak Jalanan memiliki kualifikasi dalam teori pendidikan dan praktek ketrampilan hidup. Tenaga pendidik mempunyai peran besar sebagai penghegemoni bagi anak jalanan bahwa PLK Anak Jalanan merupakan tempat bagi anak jalanan untuk memperoleh hak mereka dalam pendidikan, aktualisasi diri anak jalanan dan mengembangkan minat serta kemampuan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, pengalihan tanggung jawab penyelenggara PLK Anak Jalanan pada LSM merupakan indikasi adanya spesialisasi kerja, kesadaran kolektif yang rendah dan kegagalan pemerintah untuk memberikan pendidikan formal bagi anak jalanan. dari sini LSM bertindak sebagai *counter hegemonic* dari negara.

3. Hegemoni PLK Anak Jalanan sebagai Bagian dari Pendidikan Non Formal (PNF)

Komunikasi dan sosialisasi yang kurang intens antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan LSM membuat keberadaan PLK Anak Jalanan masih belum diketahui banyak orang. Terbukti adanya persepsi yang berkembang dalam masyarakat maupun Disdikpora bahwa PLK Anak Jalanan adalah bagian dari PNF, sehingga perlakuan Disdikpora terhadap PLK Anak Jalanan disetarakan dengan Kejar Paket A. Adanya kurikulum model penuh dan modifikasi yakni peserta didik mengikuti pelajaran reguler seperti sekolah formal lainnya di sekretariat di samping mengikuti pendidikan ketrampilan dan pembinaan mental. Kedua, model kurikulum PPI (Program Pendidikan Individual) yaitu tutor datang ke rumah peserta didik yang tidak mengikuti kelas reguler untuk memberikan materi pelajaran dan ujian. Adanya pemberlakuan kurikulum yang demikian dianggap oleh beberapa staff Disdikpora sebagai bentuk PNF sehingga peserta

didik tidak bisa mengakses Ujian Negara untuk PLK Anak Jalanan, melainkan mereka peserta didik diikutkan Ujian Kejar Paket A setara dengan SD.

Perbedaan persepsi ini juga berdampak pada permohonan ijin penyelenggaraan yang diajukan oleh LSM penyelenggara PLK Anak Jalanan. Permohonan penyelenggaraan yang diajukan masih dalam tahap verifikasi di Dinas Pendidikan, padahal permohonan tersebut sudah lama diajukan namun belum juga diproses. Monitoring dan evaluasi program PLK Anak Jalanan dilakukan oleh LSM sendiri setiap bulan, sedangkan Disdikpora belum pernah melakukan monev secara langsung.

Berdasarkan pemaparan tersebut, kurangnya komunikasi dan sosialisasi antara pemerintah pusat, pemerintah kota dan LSM menyebabkan perbedaan persepsi tentang PLK Anak Jalanan. Adanya perbedaan persepsi menjadi kendala bagi keberlangsungan PLK Anak Jalanan.

4. PLK sebagai Gerakan Sosial Anak Jalanan

Persepsi yang berkembang dalam masyarakat selama ini anak jalanan adalah anak yang mengganggu ketertiban umum dan terpinggirkan, sehingga anak jalanan tidak bisa mengakses pendidikan formal. Pendidikan yang dapat diakses hanyalah PNF. Adanya PLK Anak Jalanan telah menghegemoni anak jalanan bahwa pendidikan formal itu penting bagi mereka. Anak jalanan dapat mengikuti PLK Anak Jalanan tanpa adanya perbedaan perlakuan. PLK Anak Jalanan sedikit demi sedikit berhasil mengubah *mindset* anak jalanan tentang kehidupan dan aktivitas di jalan. Intensitas anak jalanan berada di jalan pun mulai berkurang setelah mereka mengikuti PLK Anak Jalanan.

PLK Anak Jalanan juga menghegemoni orang tua/ wali anak jalanan. Sosialisasi dan pengertian yang dilakukan oleh aktivis LSM tentang pentingnya pendidikan bagi anak, telah menumbuhkan kesadaran orang tua/ wali untuk kembali memberikan pendidikan bagi anak mereka. Meskipun dukungan yang diberikan sebatas hal itu, namun orang tua/ wali anak jalanan mempunyai harapan

agar anak mereka dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis data yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PLK Anak Jalanan LSM PPAP SEROJA sebagai berikut:

1. Anak jalanan memiliki tiga persepsi terhadap program penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh LSM. Pertama, anak jalanan memiliki kesadaran mengikuti program penanganan yang dilakukan LSM. Kedua, beberapa anak jalanan mengikuti program penanganan anak jalanan karena terpaksa. Ketiga, anak jalanan menerima dan mengikuti dengan senang hati adanya program PLK Anak Jalanan karena waktu belajar disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
2. Proses penanganan anak jalanan melalui PLK Anak Jalanan dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu, permohonan perijinan penyelenggaraan, rekrutmen peserta didik, proses pembelajaran, manajemen penyelenggaraan, penilaian dan evaluasi.
3. Hambatan Program PLK Anak Jalanan dikategorikan menjadi dua. Pertama, hambatan berasal dari dalam seperti lemahnya motivasi belajar peserta didik, kurangnya sarana prasarana dan kurangnya pendanaan. Kedua, hambatan yang berasal dari luar berupa kurangnya dukungan dari orang tua peserta didik dan dukungan dari dinas terkait untuk kemajuan PLK Anak Jalanan.
4. Dampak pelaksanaan program PLK Anak Jalanan bagi anak jalanan sendiri yaitu, anak jalanan dapat memperoleh pendidikan akademis, ketrampilan hidup dan pembinaan mental, memperoleh ijazah Kejar Paket A dan sertifikat pendidikan ketrampilan hidup atau sertifikat *soft skill*, yang terakhir intensitas anak jalanan beraktivitas di jalan berkurang atau menurun.

2. Saran

Setelah mengadakan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran untuk menambah wawasan sebagai berikut:

1. Anak jalanan hendaknya memiliki motivasi belajar untuk mengikuti PLK Anak Jalanan karena mendapatkan pendidikan merupakan hak mereka.
2. Masyarakat mengupayakan keadaan keluarga yang aman, nyaman dan berupaya memenuhi kebutuhan anak serta membangun ketahanan keluarga yang kuat sehingga anak tidak menjadi anak jalanan.
3. Dinas Sosial seharusnya melakukan koordinasi dengan Disdikpora dan LSM penyelenggara PLK Anak Jalanan untuk memberikan pendidikan formal bagi anak jalanan disamping memberikan pendidikan ketrampilan hidup dan bantuan modal usaha.
4. LSM seharusnya melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, Disdikpora dan masyarakat untuk kemajuan PLK Anak Jalanan.

Daftar Referensi

- Anonim. (2010). *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Untuk Anak Jalanan*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa
- Anonim. (2012). *Panduan Umum Pemutakhiran dan Pemetaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012*. Semarang: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
- Hadiwijoyo, S.S. (2012). *Negara, Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Raffiq, Ahmad. (2011, 3 Mei). “Solo Tak Punya Program Penanganan Anak Jalanan”. Diperoleh 17 Oktober 2012 dari <http://www.tempo.co/read/news/2011/05/03/177331845/Solo-Tak-Punya-Program-Penanganan-Anak-Jalanan>.

Setiawan, H.H. (2007). Anak Jalanan di Kampung Miskin Perkotaan (Studi Kasus Penanganan Anak Jalanan di Pedongkelan Jakarta Timur) (versi elektronik). *Jurnal Informasi*, 12 (3), 32-40 Diperoleh 9 Oktober 2012 dari http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/123073240_2086-3004.pdf

Sudjana, Djudju. (2006). *“Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Pendidikan Non Formal Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1